

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERDAGANGAN**



RANCANGAN AKHIR

RENJA

(Rencana Kerja)

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perdagangan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Perdagangan maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah

Rantau , Juli 2022

Kepala Dinas Perdagangan

Kabupaten Tapin



H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M.I.P

NIIP. 19670622 200801 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGATA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I	1
LATAR BELAKANG	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II	8
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU	8
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	8
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN	9
2.2.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Dinas Perdagangan Tahun 2021	9
2.2.2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Dan Tahun 2019	26
2.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	29
2.2.4. Perbandingan Dengan Kabupaten Lainnya Di Provinsi Kalsel	30
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD	31
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD	33

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	33
BAB III	35
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	35
3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi.....	37
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERDAGANGAN.....	38
3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	39
BAB IV	44
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
BAB V	45
PENUTUP	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin
3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pedagangan 2021
4. Review terhadap rancangan RKPD
5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD.

Dinas Perdagangan sebagai unit kerja Menyusun Petunjuk teknis, mengatur dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta menyediakan dukungan, memantau dan mengendalikan kegiatan perdagangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Perdagangan, maka disusunlah Rancangan Renja PD Dinas Perdagangan tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra PD yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Perdagangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Perangkat Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapakali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Keputusan Presiden Nomor 07 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden Nomor 07 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19);
 12. Peraturan menteri dalam negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusumataan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menreti Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuapten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
25. Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tanggal 02 Desember 2016.
26. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
28. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor: 050/38-Randal/Bappelitbang/2022 tentang pedoman penyusunan rancangan kerja perangkat daerah tahun 2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja PD Dinas Perdagangan tahun 2023 Kabupaten Tapin.

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2023 bagi Dinas Perdagangan, sesuai dengan Renstra PD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2023, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan (RENSTRA) dengan perencanaan tahunan (RENJA) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
4. Menjadikan Renja 2023 sebagai acuan utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan tahun 2023; dan
5. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Rencana Kerja PD Dinas Perdagangan dan Kabupaten Tapin tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rancangan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Rancangan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan perangkat daerah serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah, serta program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun rencana dan prakiraan maju rencana tahun berikutnya, yang meliputi urusan, bidang urusan, program dan kegiatan, lokasi, indikator kinerja dan pagu indikatif Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Perdagangan Kab. Tapin dalam menunjang IKU mempunyai 7 (tujuh) program utama urusan perdagangan sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Sedangkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dilihat Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022 pada lampiran1.

2.2. ANALISIS KINERJA DINAS PERDAGANGAN

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perdagangan. Keberhasilan kinerja dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.

Hasil keberhasilan kinerja dapat dilihat Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin pada lampiran 2:

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yakni :

2.2.1. Perbandingan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Dinas Perdagangan Tahun 2021

Pengukuran Capaian Kinerja adalah untuk mengetahui sejauhmana kinerja yang telah dicapai selama tahun 2021. Adapun Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 yaitu :

Tabel 2.2.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021 (%)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	6%	-0,23%	-3,88%

Dari tabel diatas bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan sebesar - 0.23% dengan tingkat capaian -3.88% dari target tahun 2021 sebesar 6% ,adapun cara pengukuran indikator Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2021 masih mengacu pada data terakhir 2021 (PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) yang di akses pada tanggal 7 Januari 2022) .

PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2021 (tahun n) sebesar Rp. 579.879.380.000,- sedangkan pada tahun 2020 (tahun n-1) sebesar Rp. 581.233.920.000,- sehingga dapat diketahui Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan.

Pertumbuhan volume Perdagangan diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Perdagangan.

$$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$$

G = Laju pertumbuhan volume perdagangan

PDRB1 = PDRB ADHK Sektor Perdagangan pada tahun n

PDRB0 = PDRB ADHK Sektor Perdagangan pada tahun n - 1

$$G = \frac{579.879.380.000 - 581.233.920.000}{581.233.920.000} \times 100\%$$

$$G = \frac{- 1.354.539.421}{581.233.920.000} \times 100\%$$

$$G = - 0,23 \%$$

Adapun program-program yang laksanakan untuk memenuhi sasaran strategis dan kinerja utama sebagai berikut:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- c. Program Pengembangan Ekspor
- d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

- e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

**Tabel 2.2.1.2. Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama
Esselon III dan IV Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021 (%)
Esselon III					
1	Meningkatnya Perdagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11%	9.12%	82,90%
Esselon IV					
1	Terciptanya Tertib Usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif	15%	0	0%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Untuk Tertib Usaha	Cakupan Pembinaan pelaku usaha	60%	50%	83,33%
4	Mengembangkan Usaha Perdagangan	Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti	3 Kali	2 Kali	66,67%
		Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan	24 Jenis	30 Jenis	125%
		Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	100%

- **Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

Dari tabel diatas bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar Rp. 579.879.380.000,- pada tahun 2021 dan total PDRB kabupaten Tapin 2021 sebesar Rp 6.358.877.790.000,- yang mengacu pada data terakhir 2020 (PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) yang di akses pada tanggal 7 Januari 2022) .

Kontribusi Sektor Perdagangan diukur dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Perdagangan.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Sektor Perdagangan} &= \frac{\text{PDRB sektor perdagangan}}{\text{Total PDRB Kabupaten}} \times 100\% \\ \text{Kontribusi Sektor Perdagangan} &= \frac{579.879.380.000}{6.358.877.790.000} \times 100\% \\ \text{Kontribusi Sektor Perdagangan} &= 9.12\%\end{aligned}$$

- **Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin**

Persentase Rekomendasi Izin yang diterbitkan pada tahun 2021 rekomendasi izin dari pemohon yang masuk dan diterbitkan sebanyak 242 dari target yang ditentukan pada tahun 2021 sebanyak 100% dari seluruh permohonan surat baik itu rekomendasi izin usaha maupun izin reklame dengan tingkat capaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{242}{242} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 100\%\end{aligned}$$

- **Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif**

Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif pada tahun 2021 adalah 0%. Hal ini dikarenakan beberapa kendala dalam pencapaian target penerbitan resi gudang adalah :

- Lokasi Gudang SRG yang jauh dari wilayah pertanian.
- Minimnya kesadaran pemahaman asyarakat khususnya petani tentang Sistem Resi Gudang
- Budaya masyarakat yang terbiasa langsung menjual hasil pertaniannya setelah panen
- Masih maraknya tengkulak yang pro aktif turun ke wilayah pertanian yang menjanjikan dana tunai dengan membeli hasil panen tanpa proses yang berbelit-belit.
- Adanya fasilitas kredit dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang melayani kebutuhan kredit dengan proses yang mudah dan cepat.

- Adanya pelaku usaha lain yang melakukan kegiatan usaha yang sama layaknya Sistem Resi Gudang.

Rencana Aksi (Dinas Pertanian)

- Mengoptimalkan peran PPL setiap kecamatan untuk mempromosikan SRG dalam rangka meningkatkan minat petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani untuk menyimpan hasil panen di Gudang SRG;
- Merangkul pengusaha penggilingan padi melalui Kelompok Pengusaha Penggilingan yang dibina oleh Dinas Pertanian untuk dapat memanfaatkan fasilitas penyimpanan di SRG.

Rencana Aksi (Dinas Ketahanan Pangan)

- Sepakat untuk memanfaatkan jasa penggilingan dan pengeringan gabah yang ada di Gudang SRG untuk stok gabah yang ada di Gudang milik Dinas Ketahanan Pangan dimasa yang akan datang

Rencana Aksi (Dinas Perdagangan)

- Terus mengupayakan ketersediaan anggaran dalam APBD Kabupaten Tapin untuk pengelolaan SRG dan pemeliharaan gudang;
- Mengoptimalkan usaha sosialisasi SRG kepada petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dengan melibatkan PPL di setiap kecamatan;
- Melanjutkan subsidi biaya angkut gabah;
- Memberikan insentif kepada PPL yang berhasil merekomendasikan petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani menyimpan hasil panennya di gudang SRG

• Cakupan Pembinaan pelaku usaha

Kondisi pandemi covid-19 tidak memungkinkan dilaksanakannya pembinaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga anggaran untuk pelaksanaan pembinaan

pelaku usaha dihapus dalam rangka refocusing. Sehingga Cakupan pembinaan pelaku usaha pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 60 orang dengan capaian 50 orang dengan tingkat capaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{50}{60} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 83,33 \%\end{aligned}$$

Adanya refofusing anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 berakibat dihapusnya anggaran pembinaan pelaku usaha. Penghapusan anggaran tersebut bukan berarti tidak ada pembinaan terhadap pelaku usaha. Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan ikut berkontribusi pada kegiatan SKPD lain yaitu :

- Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga tahun anggaran 2021 di Desa Mandurian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalsel bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tapin yang diundang sebagai narasumber.
- Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Desa Bitahan Baru yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov Kalsel.
- Optimalisasi strategi pemasaran anyaman purun dalam upaya meningkatkan kemandirian sosial masyarakat Desa Pebaungan Hulu yang merupakan program Kementrian Sosial RI yang dilaksanakan oleh Tim Pejuang Muda yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapin.
- **Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti**

Pada tahun 2021 sebagaimana yang telah dianggarkan dalam DPA Dinas Perdagangan Pameran yang akan diikuti, ditargetkan sebanyak 3 event, karena kondisi pandemi maka panitia dari 3 event pameran yang rencananya akan diikuti membatalkan kegiatan mereka. Meskipun rencana pameran yang akan diikuti tersebut dibatalkan maka

rencana pameran dialihkan untuk pameran terbatas yang dilaksanakan oleh Kodim 1010 Tapin dan berkontribusi pada pameran yang diikuti oleh Polres Tapin di Polda Kalsel di Banjarbaru. Dengan tingkat capaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{2}{3} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 66,67 \%\end{aligned}$$

- **Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan**

Jenis produk yang dipamerkan pada tahun 2021 sebanyak 30 jenis dengan target yang telah ditentukan 24 jenis

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{30}{24} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 125 \%\end{aligned}$$

Sebagaimana yang telah diuraikan pada poin sebelumnya bahwa karena kondisi pandemi beberapa event pameran yang sedianya akan diikuti dibatalkan maka kegiatan pameran dialihkan pada pameran terbatas yang dilaksanakan oleh Kodim 1010 Tapin dan berkontribusi pada pameran yang diikuti oleh Polres Tapin di Polda Kalsel di Banjarbaru serta berhasil mempromosikan 30 Jenis produk lokal dari 24 jenis yang ditargetkan.

- **Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan**

Sebanyak 30 jenis produk lokal yang diikuti dalam pameran terbatas oleh Kodim 1010 Tapin dan Polda Kalsel merupakan hasil produksi dari 30 pelaku usaha yang potensial untuk dipromosikan, sehingga target 30 pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan pada tahun 2021 sebanyak 30 pelaku usaha dapat terrealisasi. Dengan tingkat capaian sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{30}{30} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 100 \%\end{aligned}$$

**Tabel 2.2.1.3 Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama
Esselon III dan IV Bidang Pengembangan Saran Distribusi Perdagangan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021
Esselon III					
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	78	76,66	98,28
2	Pengembangan sarana distribusi perdagangan kabupaten	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	81%	77,78%	96,02%
3	Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	1,50%	0,87%	142,33%
Esselon IV					
1	Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang layak	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki	3 Buah	2 Buah	66,67%
2	Terlaksananya Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar	Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	5471 Orang/hari	5459 Orang/hari	99,79%
		Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas	1416 Orang/bulan	1416 Orang/bulan	100%
3	Tersedianya Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	1000 Data	920 Data	92%
4	Tersedianya informasi harga Barang Pokok dan Penting	Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%
5	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	98%	78,94%	80,55

- **Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar**

Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Adapun unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam pelayanan sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan
1	Prosedur Pelayanan
2	Kondisi bangunan pasar
3	Kejelasan Petugas Pelayanan
4	Kemampuan Petugas Pelayanan
5	Kebersihan lingkungan pasar
6	Kesopanan dan Keramahan Pelayan
7	Kewajaran Biaya Pelayanan
8	Kepastian Biaya Pelayanan
9	Kenyamanan Lingkungan
10	Keamanan Pelayanan

Jawaban atas setiap unsur pertanyaan diatas dikategorikan ke dalam empat tingkatan kualitas pelayanan yaitu:

No	Jawaban	Bobot
1	Tidak baik	1
2	Kurang baik	2
3	Baik	3
4	Sangat Baik	4

Untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Rata - Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) x 25

Adapun kategorisasi nilai persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,50 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan sample yang dijadikan responden dalam penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat pada tahun 2021 di Pasar Kabupaten Tapin ini berjumlah 110 orang, dengan hasil yang diperoleh dari survey menunjukkan kinerja unit pelayanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 76,66 berada dalam interval 76,61 – 88,30 dengan mutu kepuasan B yang dikategorikan Baik, perhitungan data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap pelayanan. Data olahan dari hasil survei dapat dilihat pada lampiran 3.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur-unsur yang mempunyai nilai terendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi harus tetap di pertahankan.

Survey kepuasan Masyarakat yang belum bisa mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat senilai 78. Adapun unsur yang perlu terus memperoleh perhatian untuk

ditingkatkan, yaitu Kondisi Bangunan Pasar, Kebersihan Lingkungan Pasar dan Kewajaran Biaya Pelayanan.

- **Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak**

Indikator ini dihitung menurut jumlah aset gedung dan bangunan yang dikuasai dan terdapat pada SIMDA BMD Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dengan capaian target sebesar 81% pada tahun 2021, adapun realisasi pada indikator ini dihitung sebagai berikut :

NO	NAMA PASAR	Lokasi	JUMLAH BANGUNAN	STATUS BANGUNAN	
				LAYAK	TIDAK LAYAK
1	Pasar Binuang Baru	Kecamatan Binuang	2	2	0
2	Pasar Hatungun	Kecamatan Hatungun	1	0	1
3	Pasar Batung	Kecamatan Piani Desa Batung	4	4	0
4	Pasar Margasari	Kecamatan Candi Laras Selatan	4	2	2
5	Pasar Raya Rantau	Kecamatan Tapin Utara Rantau	4	4	0
6	Pasar Tambarangan	Kecamatan Tapin Selatan	1	1	0
7	Pasar Bakarangan	Kecamatan Bakarangan	1	1	0
8	Pasar Miawa	Kecamatan Piani Desa Miawa	1	1	0
9	Pasar Keraton Rantau	Kecamatan Tapin Utara	13	9	4
10	Pasar Salam Babaris	Kecamatan Salam Babaris	1	1	0
11	Pasar Tatakan	Kecamatan Tapin Selatan	2	1	1
12	Pasar Bungur	Kecamatan Bungur	1	1	0
13	Pasar Muara Muning	Kecamatan Candi Laras Selatan	1	1	0
Total			36	28	8
Persentase				77,78%	22,22%

Tingkat capaian Indikator Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak tahun 2021 berdasarkan rumus indikator sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{77,78\%}{81\%} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 96,02 \%$$

- **Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok**

Koefisien variasi tertinggi ditahun 2021 yaitu pada komoditas cabe rawit sebesar 0,87% dari target sebesar 1,5% dengan tingkat capaian sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{1,5 - (0,87-1,5)}{1,5} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 142,33 \%$$

NO	NAMA BAHAN POKOK	RATA-RATA	STANDAR DEVIASI	KOEFISIEN VARIASI
1	Beras Medium	11.000,00	0,00	0,00
2	Kacang kedelai	13.500,00	1495,83	0,11
3	Cabe Merah	49.708,33	33627,45	0,68
4	Cabe Rawit	62.029,17	53661,15	0,87
5	Bawang Merah	34.237,50	28056,70	0,82
6	Daging Ayam	34.575,00	5763,71	0,17
7	Daging Sapi	130.000,00	0,00	0,00
8	Telur	24.795,83	2344,00	0,09
9	Ikan Kembung	29.583,33	14722,84	0,50
10	Minyak Goreng	15.218,75	2633,64	0,17
11	Tepung Terigu	11.000,00	0,00	0,00
12	Gula Pasir	12.041,67	239,18	0,02
Koefisien variasi tertinggi ditahun 2021 yaitu pada komoditas cabe rawit sebesar				0,87

- **Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki**

Pada tahun 2021 Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Perdagangan. Untuk target tahun 2021 sebesar 3 buah sarana dan prasarana yang dibangun/ diperbaiki namun sampai dengan akhir tahun 2021 hanya dapat terlaksana 2 buah yaitu berupa Rehab WC, Loker, adapun yang tidak dapat terlaksana yaitu pembuatan lapak pedagang sayur di Pasar Keraton karena jumlah pedagang kaki lima (PKL) lebih banyak dari pada jumlah lapak yang akan dibangun.

Pada tahun 2021 sarana dan prasarana yang diperbaiki atau rehab gedung dan bangunan pada pasar Keraton dengan menggunakan APBD Kabupaten Tapin yaitu:

1. Rehab WC Pasar Keraton

Kondisi WC sebelum direhab kurang layak karena usia bangunan yang sudah lebih dari 5 tahun sehingga mengakibatkan kerusakan pada drainase, lantai serta dinding yang rusak dan aroma tidak nyaman untuk pedagang dan pembeli;

2. Rehab Tempat Pelayanan Pembayaran Retribusi Pasar

Untuk mempermudah para pedagang dalam membayar retribusi tokonya maka diperlukan Rehab Loker di UPT Pasar Keraton, pada kondisi loket sebelumnya kurang layak sehingga pada tahun 2021 dilakukan rehab agar memberikan rasa nyaman terhadap pedagang maupun petugas loket.

Tingkat capaian pada tahun 2021 adalah

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{2}{3} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 66,67 \%\end{aligned}$$

- **Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas**

Jumlah petugas keamanan yang telah diturunkan selama tahun 2021 adalah 5459 kali dari Orang/hari dengan target 5471 kali dari Orang/hari. Sehingga tingkat capaian pada tahun 2021 adalah

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{5459}{5471} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 99,79 \%\end{aligned}$$

- **Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas**

Jumlah petugas keamanan yang telah diturunkan selama tahun 2021 adalah 1416 Orang/bulan dengan target 1416 dari Orang/hari. Sehingga tingkat capaian pada tahun 2021 adalah

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{1416}{1416} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 100 \%\end{aligned}$$

No	Petugas Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan Yang Bertugas				
		Target	Realisasi			
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV
1	Mandor Pasar Keraton	12	3	6	9	12
2	Mandor Pasar Binuang	12	3	6	9	12
3	Mandor Pasar Raya	12	3	6	9	12
4	Drainase Pasar Binuang	96	8	48	64	96
5	Drainase Pasar Raya	120	10	60	80	120
6	Drainase Pasar Keraton	240	45	165	210	240
7	Kebersihan Pasar Batung	12	3	6	9	12
8	Kebersihan Pasar binuang	108	27	54	81	108
9	Kebersihan Pasar keraton	456	114	228	342	456
10	Kebersihan Pasar margasari	24	6	12	18	24
11	Kebersihan Pasar miawa	12	3	6	9	12
12	Kebersihan Pasar muara muning	12	3	6	9	12
13	Kebersihan Pasar Raya	288	72	144	216	288
14	Kebersihan Pasar tambarangan	12	3	6	9	12
Total		1.416	303	753	1074	1416

• Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/ Warung yang akurat

Terpenuhinya Permohonan Pembuatan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios/ Warung selama tahun 2021 dengan jumlah 920 surat dari target yang ditentukan sebesar 1000 surat yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini dengan tingkat capaian sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{920}{1000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 92 \%$$

NO	NAMA PASAR	JUMLAH TOKO	KEADAAN OPERASIONAL TOKO	
			Aktif	Tidak Aktif
1	Pasar Keraton	434	360	74
2	Pasar Raya Rantau	454	399	55
3	Pasar Binuang	196	145	51
4	Pasar Tambarangan	30	16	14
TOTAL		1114	920	194

- **Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Persentase Ketersediaan informasi Barang Pokok dan Penting merupakan tersedianya data harga sembako dan barang penting lainnya di Kab. Tapin selama 1 (satu) tahun, dimana pendataan yang ditargetkan sebanyak 48 kali, dalam satu bulannya dilaksanakan sebanyak 4 kali.

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{48}{48} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 100 \%$$

- **Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran**

Berdasarkan rekapitulasi pupuk bersubsidi bulan januari sampai dengan Desember di kabupaten tapin tahun 2021 Alokasi Pupuk bersubsidi sebesar 9.644 dengan realisasi 7.612,65 sebesar 78,94%, adapun jenis pupuk yang disalurkan yaitu UREA, SP-36, ZA, NPK, Organik Granul, Organik Cair. Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran dari target sebesar 98% dengan tingkat capaian dan alokasi perkecamatan yaitu sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{78,94}{98} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Capaian} = 80,55 \%$$

No	Kecamatan	Alokasi Pupuk (Ton)	Serapan Pupuk (Ton)	Sisa (Ton)	Persentase
1	Bakarangan	501,00	340,20	160,80	67,90%
2	Binuang	875,75	798,80	76,95	91,21%
3	Bungur	454,25	376,50	77,75	82,88%
4	Candi Laras Selatan	688,25	650,00	38,25	94,44%
5	Candi Laras Utara	1.345,50	1.117,50	228,00	83,05%
6	Hatungun	402,00	323,50	78,50	80,47%
7	Lokpaikat	376,75	287,40	89,35	76,28%
8	Piani	673,50	403,50	270,00	59,91%
9	Salam Babaris	918,75	852,55	66,20	92,79%

No	Kecamatan	Alokasi Pupuk (Ton)	Serapan Pupuk (Ton)	Sisa (Ton)	Persentase
10	Tapin Selatan	1.315,00	882,50	432,50	67,11%
11	Tapin Tengah	1.247,75	959,45	288,30	76,89%
12	Tapin Utara	845,50	620,75	224,75	73,42%
Jumlah		9.644,00	7.612,65	2.031,35	78,94%

Tabel 2.2.1.4. Perbandingan Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Esselon III dan IV Bidang Kemetrolologi dan Pengawasan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021
Esselon III					
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	50%	28%	56%
		Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100%	100%	100%
Esselon IV					
1	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera	100 Unit	28 Unit	28%
2	Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	100%

- **Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan**

Pelaksanaan Tera/tera ulang dikabupaten belum mandiri sehingga harus difasilitasi dan Adanya Peningkatan Covid 19. sehingga perlunya Mengusulkan penyesuaian SOTK dan melakukan perubahan anggaran kegiatan yang dapat dilakukan pada saat pandemi dengan mengkoordinasikan dengan kasi kemetrollogian mengenai

pennyusunan rencana kegiatan yg akan dilakukan terkait program dan kegiatan yang masih belum dilaksanakan. Selama tahun 2021 Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang sebanyak 28% dari target 50% sehingga tingkat capaian :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{28\%}{50\%} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 56\%\end{aligned}$$

- **Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT**

Pelaksanaan pengawasan terhadap UTTP dan BDKT masih terkendala Adanya Peningkatan Covid 19. Sehingga mengkoordinasikan dengan dan kasi pengawasan mengenai pennyusunan rencana kegiatan yg akan dilakukan terkait program dan kegiatan yang masih belum dilaksanakan. Selama tahun 2021 telah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha bidang metrologi sehingga tingkat capaian :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 100\%\end{aligned}$$

- **Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera**

Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP mengalami penurunan, Karena merupakan dampak Pandemi Covid-19, dimana berdasarkan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat PPKM level 4 yang berlaku di beberapa wilayah Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Tapin maka Pelayanan Tera/Tera Ulang terjadi penundaan dari jadwal yang telah dibuat oleh BSML Region III untuk Kabupaten Tapin dan Pelayanan Tera/Tera Ulang belum maksimal karena untuk Kabupaten Tapin dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang masih difasilitasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III untuk Wilayah Kalimantan, untuk Unit Metrologi Legal di Kabupaten Tapin sendiri belum bisa Melayani

secara mandiri dikarenakan belum selesai nya SOTK untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang. Karena Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak dapat dilaksanakan otomatis sertifikat Tera/Tera Ulang tidak diterbitkan, maka sebagai gantinya diberikan surat keterangan penundaan Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang bagi pemohon. Selama tahun 2021 Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang sebanyak 28 Unit dari target 100 Unit sehingga tingkat capaian :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{28}{100} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 28 \%\end{aligned}$$

- **Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina**

Rencananya Penyuluhan kemetrologian dilakukan secara langsung yaitu penyuluhan kemetrologian melalui tatap muka dengan jumlah peserta 300 orang dengan dua kali pelaksanaan kegiatan karena kondisi penyebaran covid yang semakin meningkat maka penyuluhan melalui tatap muka tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Pada Anggaran Perubahan kegiatan diubah menjadi Penyuluhan secara tidak langsung yaitu penyuluhan kemetrologian melalui media cetak sehingga tingkat capaian dapat tercapai dengan capaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Capaian} &= \frac{300}{300} \times 100\% \\ \text{Tingkat Capaian} &= 100 \%\end{aligned}$$

2.2.2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 Dan Tahun 2019

Analisis realisasi dan capaian kinerja Dinas Perdagangan pada LKIP Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi)

dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja

Utama Tahun 2021 dengan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1. Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 dan 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
			2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	9%	7,84	10%	6,38	6%	-0,23%
	Meningkatnya Perdagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	9%	8.82%	10%	9.0%	11%	9.12%
	Terciptanya Tertib Usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang diberikan rekomendasi izin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif	-	-	-	-	15%	0
	Meningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Untuk Tertib Usaha	Cakupan Pembinaan pelaku usaha	-	-	-	-	60%	50%
	Mengembangkan Usaha Perdagangan	Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti	3 Kali	3 Kali	3 Kali	1 Kali	3 Kali	2 Kali
		Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan	22 Jenis	22 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	30 Jenis
		Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan	-	-	-	-	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha
	Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	75 IKM	69.82 IKM	76 IKM	72,09 IKM	78 IKM	76,66 IKM
	Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	-	-	-	-	81%	77,78%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
			2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Menjaga Kestabilan Harga & Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	-	-	-	-	1,5%	0,87%
	Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang layak	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki	-	-	-	-	3 Buah	2 Buah
	Terlaksananya Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar	Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	-	-	-	-	5471 orang/hari	5459 orang/hari
		Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas	-	-	-	-	1416 Orang/bulan	1416 Orang/bulan
	Tersedianya Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung yang akurat	1000	660	1000	735	1000	920
	Tersedianya informasi harga Barang Pokok dan Penting	Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	-	-	98%	97,78%	98%	78,94%
	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	100%	85,08%	100%	48%	50%	28%
		Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
			2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera	1320 buah	1123 buah	150 Buah	72 unit	100 Unit	28 Unit
	Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha

2.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Analisis capaian kinerja Dinas Perdagangan pada LKIP Tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan		Tingkat Capaian %
			Target 2023	Realisasi 2021	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	8%	-0,23%	-2,88%
2	Meningkatnya Perdagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,5%	9.12%	72,96
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	79 IKM	76,66 IKM	97,04%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan		Tingkat Capaian %
			Target 2023	Realisasi 2021	
4	Pengembangan sarana distribusi perdagangan dikabupaten	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	89%	77,78%	87,39%
5	Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	1,40%	0,87%	138,21
6	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	70%	28%	40%
		Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100%	100%	100%

2.2.4. Perbandingan Dengan Kabupaten Lainnya Di Provinsi Kalsel

Pada perbandingan ini masih menunjukkan data Tahun 2021 masih menggunakan nilai sementara, karena nilai tersebut BPS belum mengeluarkan Nilai PDRB tahun 2020, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:

Pada tahun 2016 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin 8,78% menempati urutan ke-3 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2017 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin 6,49% menempati urutan ke-12 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2018 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin 7,84% menempati urutan ke-5 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2019 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin 6,38% menempati urutan ke-10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan

Pada tahun 2020 LPE Sektor Perdagangan Kabupaten Tapin -0,23% menempati urutan ke-1 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan terendah

Berikut ini adalah tabel Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan di Provinsi Kalimantan Selatan menurut Lapangan Usaha berdasarkan Atas Dasar Konstan (ADHK) :

Tabel 2.2.4.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Tanah Laut	8,15%	7,85%	7,95%	7,21%	6,59%	-2,93%	-2,93%
2	Kotabaru	8,37%	7,34%	7,77%	7,45%	7,10%	-1,41%	-1,41%
3	Banjar	7,82%	7,84%	6,75%	6,91%	6,39%	-3,93%	-3,93%
4	Balangan	5,89%	7,71%	8,12%	3,70%	4,68%	-0,93%	-0,93%
5	Banjarmasin	7,07%	8,18%	8,03%	7,96%	7,75%	-3,09%	-3,09%
6	Banjarmasin	6,54%	7,00%	6,87%	6,83%	6,89%	-5,15%	-5,15%
7	Barito Kuala	7,82%	7,92%	7,77%	7,68%	7,22%	-3,35%	-3,35%
8	Hulu Sungai Selatan	4,76%	4,60%	5,28%	4,84%	4,96%	-1,91%	-1,91%
9	Hulu Sungai Tengah	9,37%	7,91%	6,89%	7,74%	8,60%	-3,36%	-3,36%
10	Hulu Sungai Utara	7,44%	7,97%	8,24%	8,13%	7,51%	-4,65%	-4,65%
11	Tabalong	8,67%	9,03%	11,33%	9,47%	9,48%	-2,30%	-2,30%
12	Tanah Bumbu	8,21%	10,22%	9,20%	8,41%	8,19%	-4,53%	-4,53%
13	Tapin	7,88%	8,78%	6,49%	7,84%	6,38%	-0,23%	-0,23%

* Catatan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2021 merupakan data sementara yang merupakan update terbaru dari BPS masing-masing Kabupaten/Kota

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN DINAS PERDAGANGAN

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Perdagangan sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya pengembangan usaha pada sektor Perdagangan;
- 2) Masih beredarnya barang atau produk kadaluarsa yang tidak layak jual di Kabupaten Tapin;
- 3) Kurang dikenalnya produk kerajinan Kabupaten Tapin;
- 4) Pengembangan potensi sumber alam dengan tingkat pengelolaan dan pemanfaatan saat ini perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan perdagangan di daerah
- 5) Perlu dibangun UPTD Meterologi pengujian alat ukur takar timbang dan penyediaan aparatur penera.
- 6) Peningkatan informasi tentang potensi komoditi yang berpeluang ekspor khususnya kepada dunia usaha dan investor baik dalam dan luar negeri sehingga tertarik untuk pengembangannya di Kabupaten Tapin.
- 7) Perlunya dirancang perda di bidang Perdagangan yang menyangkut perlindungan konsumen dan penerapan SNI wajib uji;
- 8) Mempercepat sasaran pembangunan atau revitalisasi sarana dan pembinaan di bidang perdagangan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan;
- 9) Perlunya data dan informasi kepada pelaku usaha tentang wajib daftar perusahaan dan syarat-syaratnya.
- 10) pandemi Covid-19, dimana Kabupaten Tapin menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 sehingga mengakibatkan jam operasional pasar tradisional, warung/cafe, tempat hiburan maupun toko swalayan dibatasi.
- 11) Pelayanan Tera/Tera Ulang belum maksimal karena untuk Kabupaten Tapin dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang masih difasilitasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III untuk Wilayah Kalimantan, untuk Unit Metrologi Legal di

Kabupaten Tapin sendiri belum bisa Melayani secara mandiri dikarenakan belum selesai nya SOTK untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- 12) Kurangnya kesadaran dari PKL dalam berjualan sesuai dengan penempatannya sehingga kurang tertata dengan rapi dilingkungan pasar Keraton khususnya dilokasi berjualan pasar pagi.
- 13) Belum adanya Sistem dan Jaringan Informasi Harga Sembako Perdagangan di Kabupaten Tapin .
- 14) Perbaikan sarana dan prasarana perdagangan terutama bagi pasar tradisional memerlukan biaya yang cukup besar sedangkan kemampuan APBD Kabupaten Tapin tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan dan revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tapin.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perdagangan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappelitbang berdasarkan Rancangan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD dapat dijabarkan dalam Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan pada lampiran 4.

2.5. PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaaan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan

serta kebutuhan pembangunan tahun 2023, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Tabel 2.4. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 yang terkait dengan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengekspor batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada perencanaan pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;

2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing, melalui:

1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa;
2. Penyediaan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah

5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan Pangan
7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan public

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERDAGANGAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Dinas Perdagangan selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan pada dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2023 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan.

**Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan
Dinas Perdagangan kab. Tapin**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun	
				2023	Kondisi Akhir Periode
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	8%	8%

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Kab. Tapin Tahun 2023 adalah Sebagai berikut :

Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)
	Tolak Ukur	Target	APBD Kab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan	A	5.133.012.616
	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	
	Persentase Aset Yang Tercatat	100%	
	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN	100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	10 Dokumen	11.014.550
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	11.014.550
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	4 Dokumen	3.720.107.382
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.709.818.906
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.988.520
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6.299.956
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawalannya dilayani secara tertib	30 orang	677.246.864

Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)
	Tolak Ukur	Target	APBD Kab
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	17.995.232
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	67.998.618
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	91.849.074
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	10.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	21.562.798
Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	3.210.642
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	6.798.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	457.832.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset yang tercatat	25 unit	145.056.764
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	122.362.764
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	22.694.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Pembayaran Rekening Listrik, Internet, Telepon, dan Jasa Administrasi	12 bulan	330.013.540
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	135.038.740
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	194.974.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset yang dipelihara	100 persen	249.573.516
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	86.346.284

Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)
	Tolak Ukur	Target	APBD Kab
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	32.500.000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	12 Bulan	6.657.900
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	124.069.332
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,50 persen	51.998.800
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terciptanya Tertib Usaha perdagangan	100%	51.998.800
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250 Dokumen	51.998.800
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,50 persen	126.557.173
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan pelaku usaha	80 persen	126.557.173
	Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti	3 Kali	
	Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan	100%	
	Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan	100%	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 Pelaku Usaha	19.994.312
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	55.951.071
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	50.611.790

Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)
	Tolak Ukur	Target	APBD Kab
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,50 persen	349.996.772
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara kumulatif	15 persen	349.996.772
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	349.996.772
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	79 Indeks	2.888.515.963
	Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	89 persen	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki	4 buah	2.787.257.871
	Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	1800 org/hari	
	Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas	1418 org/bulan	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	699.972.034
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	2.087.285.837
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung	100%	101.258.092
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	101.258.092
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	1,40 persen	76.415.582
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 persen	61.415.630

Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)
	Tolak Ukur	Target	APBD Kab
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	46.442.830
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	14.972.800
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	100 persen	14.999.952
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	14.999.952
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	70 persen	224.966.294
	Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100 persen	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera	500 unit	224.966.294
	Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina	400 orang	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit	24.968.463
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400 Orang	199.997.831
TOTAL			8.851.463.200

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Rencana Program dan Kegiatan dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023 dalam Tabel 2.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran 5.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perdagangan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Perdagangan maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis".

BUPATI TAPIN,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Kabupaten Tapin

Nama SKPD : Dinas Perdagangan													
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran SKPD tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD		Catatan	
						Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan kinerja yang wajib dibuat SOPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	30		10	10	100%	10	20	66,67%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	36		12	12	100%	12	24	66,67%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Bulan)	36		12	12	100%	12	24	66,67%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Bulan)	36		12	12	100%	12	24	66,67%			
	Administrasi Umum/Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	36		12	12	100%	12	24	66,67%			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	36		12	12	100%	12	24	66,67%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bulan)	36		12	12	100%	12	24	66,67%			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Bulan)	36		12	12	100%	12	24	66,67%			
	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material (Bulan)	36		12	12	100%	12	24	66,67%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bulan)	36		12	12	100%	12	24	66,67%			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran SKPD tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD		Catatan
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (Unit)	54	14	14	100%	100%	20	34	62,96%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	40	7	7	100%	100%	14	21	52,50%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	36	12	12	100%	100%	12	24	66,67%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)	36	12	12	100%	100%	12	24	66,67%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Bulan)	36	12	12	100%	100%	12	24	66,67%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bulan)	36	12	12	100%	100%	12	24	66,67%	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Bulan)	36	12	12	100%	100%	12	24	66,67%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bulan)	36	12	12	100%	100%	12	24	66,67%	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penerbitan Izin Pengaliran Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan yang diproses (Surat)	750	250	242	97%	97%	250	492	65,60%	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengedar dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Obyek berpotensi mengedarkan yang dimonitor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Obyek berpotensi mengedarkan yang dimonitor (lokasi)	36	12	12	100%	100%	12	24	66,67%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran SKPD tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD		Catatan
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	66,67%	66,67%	100%	100%	100%	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang mengikuti sosialisasi (pelaku usaha)	150		50	50	100%	50	100	66,67%	
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran produk unggulan daerah yang diikuti (kali)	6		2	2	100%	2	4	66,67%	
		Jumlah Jenis Produk Yang Dipamerkan (buah)	72		24	24	100%	24	48	66,67%	
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran produk unggulan daerah yang diikuti (kali)	3		1	0	0%	1	1	33,33%	
		Jumlah Jenis Produk Yang Dipamerkan (buah)	72		24	24	100%	24	48	66,67%	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Petani yang mendapat Rusi Gudang	100%		100%	0	0%	100%	100%	100%	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%		100%	72,73%	72,73%	100%	100%	100%	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Petani yang mengikuti Sosialisasi (orang)	180,00		55	40	72,73%	60,00	100,00	55,56%	
		Jumlah peserta yang mengikuti Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten (Buah)	225,00		75	0	0,00%	75,00	75,00	33,33%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar (indeks)	79		78	76,66	98,28%	78	76,66	97,04%	
		Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	89%		81%	77,78%	96,02%	85%	77,78%	87,39%	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%		100%	67%	67%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki (buah)	11		3	2	66,67%	4	6	54,55%	
	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	9071		5471	5459	99,78%	1800	7259	80,02%	
		Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas	4248		1416	1416	100%	1416	2832	66,67%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran SKPD tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD		Catatan
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketersediaan database pasar	100%		100%	92%	92%	100%	100%	100%	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Data Penyewa Toko/Kios/Los/ Warung yang akurat	3000		1000	920	92%	1000	1920	64,00%	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok									
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pendataan Harga Barang Pokok dan Barang Penting	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (kali)	144		48	48	100%	48	96	66,67%	
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat jumlah dan Tepat Sasaran	100%		98%	78,94%	81%	100%	79%	79%	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur timbangan dan pertimbangannya (UTTP) yang bertanda tera sah	100%		50%	28%	56%	60%	60%	60%	
		Persentase Sosialisasi Pengawasan alat ukur takar timbang dan pertimbangannya (UTTP)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera (Buah)	1100		100	28	28%	500	528	48,00%	
	Pengawasan/ Penyaluran Metrologi Legal	Jumlah Konsumen mendapatkan penyaluran (orang)	1050		900	300	100%	350	650	61,90%	

[illegible]

[illegible]

KABUPATEN TAPIN										
Kode	Unitas/Bidang/Unitas/Program/ Kegiatan/ Job Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)			Prekiran Majo Tahun 2024	
				Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kab. Tapin	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan	A	5.133.032.516		5.385.936.360	
					Persentase Penyerapan Anggaran	100%			100%	
					Persentase Aset Yang Tercatat	100%			100%	
					Persentase peningkatan pengurusan administrasi	100%			100%	
					Kepegawaian ASN					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Tapin	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	10 Dokumen	11.014.550		10 Dokumen	15.750.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	11.014.550		10 Laporan	15.750.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	4 Dokumen			4 Dokumen	3.905.097.964
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menemuka Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.720.107.382		360 Orang/bulan	3.895.282.964
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.988.520		1 Laporan	4.200.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	6.299.956		2 Laporan	6.615.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kab. Tapin	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara terdib	30 orang	677.246.864		30 orang	694.575.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	17.995.232		3 Paket	18.900.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	67.998.618		3 Paket	71.400.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	91.849.074		1 Paket	96.600.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	10.000.000		3 Paket	10.500.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	21.562.798		3 Paket	3.412.500
	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	3.210.642		1 Paket	3.412.500
	Facilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Tapin	Waktu Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	6.798.000		1 Laporan	7.350.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan/Konsultasi SKPD			Kab. Tapin	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	457.872.500		1 Laporan	483.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Aset yang tercatat	25 unit	145.056.764		25 unit	180.600.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	122.352.764		10 Unit	141.750.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	22.604.000		15 Unit	38.850.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah			Kab. Tapin	Terdapatnya Dokumen Pembayaan Rekening Listrik, Internet, Telepon, dan Jasa Administrasi	12 bulan	330.013.540		12 bulan	346.542.840
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ardan Listrik			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ai dan Listrik	12 Bulan	135.038.740		1 Laporan	141.790.840
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	194.974.800		1 Laporan	204.750.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pengkondaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin	Persentase Aset yang dipelihara	100 persen	249.573.516		100 persen	242.370.556
				Kab. Tapin	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	86.346.284		25 Unit	84.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikator Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)			Prakiraan Mula Tahun 2024	
					Tolok Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	32.500.000			20 Unit	21.000.000
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			Kab. Tapin	Waktu Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	12 Bulan	6.657.800			3 Unit	7.350.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Waktu Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	124.059.332			3 Unit	130.020.556
	PROGRAM FENANMAN DAN PENDATANGAN PERUSAHAAN			Kab. Tapin	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDHB	12,50 persen	51.998.800			12,50 persen	54.600.000
	Pemberian Ijin Pengolahan Pasir Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Jasa Usaha Toko Swalayan			Kab. Tapin	Terdapatnya Tertib Usaha perdagangan	100%	51.998.800			100%	54.600.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Pasir Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perolehan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Kab. Tapin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perolehan Pasir Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perolehan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250 Dokumen	51.998.800			1 Dokumen	54.600.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			Kab. Tapin	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDHB	12,50 persen	126.557.173			12,50 persen	136.500.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Peneran Dagang dan Mit Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Cakupan Pembinaan pelaku usaha	80 persen	126.557.173			80 persen	136.500.000
					Jumlah Partneran produk lokal yang diikuti	3 kali				3 kali	
					Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan	100%				100%	
					Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan	100%				100%	
				Kab. Tapin	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 Pelaku Usaha	19.994.312			30 Pelaku Usaha	21.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran	5 Pelaku Usaha	55.951.071			2 Pelaku Usaha	63.000.000
	Pameran Dagang Lokal			Kab. Tapin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran	10 Pelaku Usaha	50.611.790			3 Pelaku Usaha	52.500.000
	PROGRAM PENGUNJUNIAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			Kab. Tapin	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDHB	12,50 persen	349.996.772			12,50 persen	367.500.000
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri			Kab. Tapin	Pertumbuhan jumlah rest gudang yang diberikan secara komulatif	15 persen	349.996.772			15 persen	367.500.000
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	349.996.772			30 UMKM	367.500.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Kab. Tapin	Indeks Kejuasan Masyarakat (pedagang) terhadap Ketersediaan Pasar	79 Indeks	2.888.535.963			79 Indeks	5.171.250.000
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Kab. Tapin	Persentase pedagang pasar yang memenuhi kriteria layak	89 persen				89 persen	
				Kab. Tapin	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki	4 buah	2.787.257.871			4 buah	5.092.500.000
					Jumlah Petugas Kebersihan yang bertugas	1800 org/hari				1800 org/hari	
				Kab. Tapin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1418 org/bulan	699.972.034			1418 org/bulan	2.835.000.000
				Kab. Tapin	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	2.587.285.837			10 Unit	2.257.500.000
				Kab. Tapin	Persentase Data Penyewa Toko/Kios/Los/Waring	100%	101.258.092			1000 data	78.750.000
				Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengusaha Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	101.258.092			1 Dokumen	78.750.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BAGIAN KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Kab. Tapin	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	1,40 persen	76.415.582			1,40 persen	42.000.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 persen	61.415.630			100 persen	66.250.000

Kode	Unsur/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikasi Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)			Prakiraan Mula Tahun 2024	
					Tolok Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator(Rp)
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Keluaran Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Keluaran Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	46.442.830			48 Laporan	10.500.000
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	14.972.800			4 Laporan	15.750.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran	100 persen	14.999.952			100 persen	15.750.000
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 50%			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 50%	1 Laporan	14.999.952			1 Laporan	15.750.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			Kab. Tapin	Persentase alat ukur timbangan dan perengkapannya (UTTP) yang bertanda sera sah tahun berjalan	70 persen	224.966.294			70 persen	236.250.000
					Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BOKT	100 persen				100 persen	
				Kab. Tapin	Jumlah alat ukur, Takar, Timbangan dan Perengkapannya (UTTP) yang dilisensi	500 unit	224.966.294			500 unit	236.250.000
					Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina	400 orang				400 orang	
				Kab. Tapin	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perdagangan Diranca Ulang	500 Unit	24.968.463			500 Unit	210.000.000
				Kab. Tapin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400 Orang	199.997.831			400 Orang	26.250.000
					TOTAL		8.851.463.200				11.394.036.360

Rantau,
 Juli 2022
 Kepala Dinas
 Perdagangan Kab. Tapin

 H. SUGIAN NOOR, S. Hut, MM, M.IP
 NIP. 196706222008011 006

**PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (PEDAGANG)
TERHADAP PELAYANAN PETUGAS PER RESPONDEN**

SKPD
TAHUN

: DINAS PERDAGANGAN
: 2021

No Responden	Unsur yang dinilai									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4
7	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
8	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4
15	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
20	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
21	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2
37	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2
38	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
48	3	2	2	3	2	4	2	3	3	3
49	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3
50	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
53	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
56	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3
57	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
58	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
59	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3

**NILAI BOBOT JAWABAN RESPONDEN, NILAI PER UNSUR, NILAI RATA-RATA, NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
DAN NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (PEDAGANG) PADA TAHUN 2021**

NO	UNSUR PELAYANAN	ALTERNATIF JAWABAN DAN BOBOT NILAI								JUMLAH NILAI	
		A	NU	B	NU	C	NU	D	NU	NILAI UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Prosedur Pelayanan	0	0	2	4	101	303	7	28	335	3,05
2	Kondisi bangunan pasar	0	0	10	20	95	285	5	20	325	2,95
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	0	0	2	4	98	294	10	40	338	3,07
4	Kemampuan Petugas Pelayanan	0	0	2	4	103	309	5	20	333	3,03
5	Kebersihan lingkungan pasar	0	0	6	12	102	306	2	8	326	2,96
6	Kesopanan dan Keramahan Pelayanan	0	0	1	2	98	294	11	44	340	3,09
7	Kewajaran Biaya Pelayanan	0	0	5	10	100	300	5	20	330	3,00
8	Kepastian Biaya Pelayanan	0	0	1	2	64	192	45	180	374	3,40
9	Kenyamanan Lingkungan	0	0	1	2	104	312	5	20	334	3,04
10	Kemamanan Pelayanan	0	0	3	6	96	288	11	44	338	3,07
Jumlah NRR Terbagi/Unsur										3,066	
Indeks Kepuasan Masyarakat										76,66	
Mutu Pelayanan										B	
Kinerja Unit Pelayanan										Baik	

Rantau, 26 Oktober 2021

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Rantau,

 H. HARUNSYAH, SE, MM
NIP. 19560203 199302 1 002